

**PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN KEMITRAAN PADA AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
(STUDI KASUS PADA BEBERAPA SENTRA PRODUKSI HORTIKULTURA
DI SUMATERA)**

Erfit

*Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani untuk masing-masing pola kemitraan yang ada pada agribisnis hortikultura khususnya untuk komoditi sayuran. Penelitian ini menggunakan metode *multy case study* yang menggabungkan studi kasus dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pemberdayaan petani walaupun ada pembinaan yang diberikan perusahaan mitra dalam bentuk bantuan teknis kepada petani, secara umum *contract farming* sebenarnya tidak banyak mendorong ke arah kemandirian petani. Dengan kata lain *contract farming* sebenarnya tidak banyak membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani. Selain itu dengan *contract farming* sebenarnya telah banyak menciptakan tingginya tingkat ketergantungan petani kepada pihak perusahaan mitra (*dependency*) bukan saling ketergantungan (*interdependency*). Sementara itu dengan kemitraan tradisional petani dianggap lebih dapat mandiri. Walaupun dalam kemitraan tradisional memperlihatkan relatif kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul yang mengarah kepada pemberdayaan petani, namun demikian dengan kemitraan tradisional secara umum lebih dapat menjadikan petani mandiri karena petani dapat memutuskan berbagai hal dengan leluasa berkaitan dengan usaha tani yang dilakukannya.

Kata kunci: kemitraan, contract farming, pemberdayaan dan agribisnis hortikultura.

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia agribisnis hortikultura merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari cukup besarnya kontribusi dari subsektor hortikultura terhadap PDB nasional dan selalu menunjukkan kenaikan, dari data yang ada pada tahun 2004 subsektor hortikultura telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,65 persen (Departemen Pertanian, 2004). Selain itu subsektor hortikultura juga telah mampu menyediakan lapangan kerja untuk 3 juta orang pada tahun yang sama.

Salah satu usaha yang dilakukan dalam pengembangan agribisnis hortikultura adalah melalui program kemitraan. Secara spesifik Eaton *et al* (2001) mendefinisikan kemitraan

dalam agribisnis sebagai jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku agribisnis yang saling menguntungkan. Beberapa pola kemitraan yang telah berkembang selama ini khususnya dibidang agribisnis hortikultura (sayuran) pada umumnya adalah dalam bentuk *contract farming*, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan subkontrak dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (Basdabella, 2001, Hasbi, 2001 dan Sumardjo *et al*, 2004). Selain itu khususnya pada berbagai daerah sentra produksi sayuran juga telah berkembang kerjasama usaha (kemitraan) antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya yang terbentuk secara otonom dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan petani yang diatur dengan aturan-aturan informal yaitu kepercayaan dan kejujuran yang disebut dengan kemitraan

lokal atau kemitraan tradisional (Pranadji, 1997 dan Hastuti dan Bambang, 2004).

Melalui kemitraan diharapkan adanya upaya-upaya yang mengarah kepada pemberdayaan petani yang pada gilirannya nanti akan dapat mengembangkan usahanya. Pemberdayaan secara etimologi atau dari asal usul kata berasal dari kata *empowerment* yang secara umum dapat diartikan dengan memberikan kemampuan atau mengalihkan atau mendelegasikan kekuasaan atau kewenangan (Soewardi, 1997 dan Sihaloho, 2004).

Dalam konteks pemberdayaan petani agribisnis hortikultura khususnya sayuran melalui program kemitraan dapat diartikan bagaimana memberikan keberdayaan atau kekuatan kepada petani untuk dapat mengakses berbagai sumberdaya yang diperlukan oleh usaha agribisnis hortikultura tersebut melalui berbagai program kemitraan yang dilakukan. Pemberdayaan dengan kemitraan berarti memberdayakan petani atau membuat mereka berdaya, mampu, kuat dan mandiri. Sehingga dengan demikian usaha agribisnis hortikultura khususnya sayuran akan dapat lebih mandiri. Kalau sudah demikian halnya, pada gilirannya nanti pemberdayaan dengan program kemitraan ini juga diharapkan akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani hortikultura dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pada pengembangan usaha agribisnis hortikultura yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (Departemen Pertanian, 2004). Penelitian ini ingin melihat bagaimana upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani untuk masing-masing pola kemitraan yang ada pada agribisnis hortikultura khususnya untuk komoditi sayuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian multi studi kasus (*multy case study*) dalam hal ini penelitian yang menggabung metode studi kasus dan survei. Penelitian ini dilakukan di propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara dengan beberapa kasus kemitraan usaha pada

agribisnis hortikultura yang meliputi pola kemitraan *contract farming* antara petani dengan PT Putra Agro Sejati (PT PAS) di kabupaten Karo dan antara petani dengan PT Vindia Agroindustri (PT VA) di kabupaten Simalungun, pola kemitraan dagang umum antara petani dengan CV Mburaq di kabupaten Karo dan petani dengan PT Victor Jaya di kabupaten Simalungun dan pola kemitraan tradisional antara petani dengan pedagang pengumpul di kabupaten Agam, Solok dan Tanah Datar. Pemilihan lokasi dan kasus penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan ketersediaan dan keragaman dari model kemitraan yang ada di lokasi penelitian.

Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku usaha agribisnis hortikultura (sayuran) yang terlibat langsung dalam kegiatan kemitraan diantaranya petani, pengurus kelompok tani, perusahaan mitra, pedagang pengumpul dan pemerintah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi pemerintah diantaranya dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Untuk mencapai tujuan penelitian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabulasi silang, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang diteliti. Analisis akan dilakukan terhadap berbagai indikator dalam pemberdayaan terhadap petani agribisnis hortikultura yang meliputi: pembinaan yang diberikan perusahaan mitra, pembinaan yang dilakukan pemerintah, kondisi internal dan eksternal kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Petani Dengan *Contract Farming*

Seperti dijelaskan pada bahagian terdahulu aspek pemberdayaan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan terhadap petani dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia petani mitra dan kemandirian petani dikaitkan

dengan jalannya kemitraan usaha. Dengan kata lain dari aspek pemberdayaan ini dapat kita lihat dari hal-hal apa yang telah dilakukan atau upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh perusahaan mitra ataupun pemerintah yang mengarah kepada peningkatan sumberdaya manusia petani, posisi tawar petani petani dan kemandirian petani. Berikut dikemukakan hasil penelitian berkaitan dengan aspek pemberdayaan ini dalam kemitraan antara petani dengan PT PAS dan PT VA dengan pola kemitraan *contract farming* dengan indikator: pembinaan yang diberikan oleh perusahaan mitra, pembinaan yang diberikan pemerintah, kondisi internal dan eksternal kelompok tani.

Pembinaan perusahaan

Dari hasil wawancara dengan petani, perusahaan mitra dan informan kunci dari sisi pembinaan yang diberikan oleh pihak perusahaan mitra dapat kita lihat dengan adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh PT PAS dan PT VA sebagai perusahaan mitra melalui petugas lapangannya. Adanya pembinaan ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam SPK dimana kemitraan usaha yang dilakukan tidak hanya mencakup bidang pemasaran dan bantuan modal saja tetapi juga adanya pembinaan teknis yang diberikan oleh perusahaan mitra. Jadi dalam hal ini PT PAS dan PT VA memberikan bantuan teknis melalui petugas lapangan yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan secara berkala. Bantuan teknis dilakukan terutama berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan pengelolaan tanaman yang dimitrakan. Dengan adanya bantuan teknis kepada petani pihak perusahaan berharap akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sehingga komoditi yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu yang diharapkan sesuai yang ditentukan dalam SPK. Selain itu dalam kaitannya dengan program kemitraan melalui pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan mitra kepada petani diharapkan juga adanya alih teknologi dari pihak perusahaan mitra kepada petani mitra berkaitan dengan pengelolaan tanaman yang

lebih baik. Namun demikian menurut informan kunci, permasalahannya adalah dalam hal interaksi biasanya lebih banyak dilakukan kepada petani-petani yang dianggap berhasil sehingga tidak merata kepada semua petani dan akibatnya penyebaran informasi banyak dilakukan oleh mereka sesama petani. Kemudian dari intensitas atau frekuensinya yang terbatas sehingga tidak banyak membantu petani mitra dalam hal peningkatan kualitas komoditi yang dihasilkan. Selain itu bagi sebahagian petani mitra hal-hal yang disampaikan petugas lapangan perusahaan mitra selama ini adalah hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh petani selama ini, dengan demikian sebenarnya tidak ada hal yang baru.

Pembinaan pemerintah

Dari sisi pembinaan yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah melalui tenaga penyuluh atau PPL yang dimiliki juga memberikan pembinaan kepada petani melalui kelompok tani. Sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 273 tahun 2007 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, maka pembinaan terhadap kelompok tani diarahkan kepada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuh kembangkan kerjasama antara petani dan pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan usaha taninya (Departemen Pertanian, 2007). Selain itu pembinaan terhadap kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya. Dengan adanya pembinaan terhadap kelompok tani ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Namun demikian permasalahannya adalah pembinaan lebih banyak diarahkan kepada aspek-aspek agronomis sehingga pembinaan yang

diberikan tidak banyak membantu dalam memperkuat posisi tawar petani dalam menjalankan kemitraan. Selain itu ada beberapa petani yang merasa kurang yakin dengan apa yang disampaikan oleh petugas PPL sehingga penyuluhan yang diberikan dirasakan kurang bermanfaat.

Kondisi internal kelompok tani

Keberhasilan dari suatu kemitraan tidak terlepas dari dukungan kelembagaan usaha yang ada di tingkat petani khususnya dalam bentuk kelompok tani. Karena dengan kelompok tani akan dapat memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam menjalankan kemitraan usaha jika dibandingkan petani bergerak sendiri-sendiri sehingga petani akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari kemitraan usaha yang mereka lakukan. Dengan kelompok tani kekuatan-kekuatan dan potensi yang dimiliki petani dapat terhimpun menjadi satu kekuatan bersama dan potensi yang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dengan demikian adanya kelompok tani yang kuat pada dasarnya sangatlah dibutuhkan dalam mendorong keberhasilan kemitraan. Dengan kata lain peranan dari suatu kelompok tani sangatlah menentukan keberhasilan dari suatu kemitraan terutama dikaitkan dengan posisi tawar yang dimiliki oleh petani mitra. Dalam kemitraan peranan dari kelompok tani tercermin dari seberapa besar keterlibatan dari kelompok tani dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan kemitraan yang pada dasarnya mencerminkan kondisi internal dari suatu kelompok tani..

Dalam kaitannya dengan program kemitraan yang dijalankan pada kasus PT PAS dan PT VA dengan pola kemitraan *contract farming*, terlihat bahwa kelompok tani tidak berperan atau tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan kemitraan yang dijalankan oleh para anggota kelompok tani. Sehingga keberadaan dari pada kelompok tani tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya kemitraan yang dilakukan oleh petani. Hal ini terjadi dikarenakan para petani mitra dalam menjalin hubungan kemitraan dengan PT PAS

ataupun PT VA tidak atas nama kelompok tetapi adalah atas nama pribadi masing-masing petani. Selain itu untuk kepentingan untuk lebih memudahkan koordinasi para petani mitranya pada kasus PT PAS, perusahaan juga membentuk kelompok tersendiri yang berbeda dengan kelompok tani yang telah ada. Selain itu kemitraan yang dijalankan oleh kedua perusahaan dengan petani itu adalah secara perorangan tidak atas nama kelompok. Dengan demikian bantuan teknis yang diberikan kepada para petani mitra yang ada pada kedua perusahaan tersebut adalah bersifat tidak langsung dan sangat terbatas. Jadi walaupun masing-masing petani mitra adalah merupakan anggota kelompok tani, tetapi mereka melakukan kemitraan adalah atas nama perseorangan tidak kelompok.

Disamping itu tidak berperannya kelompok tani dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan juga tidak terlepas dari aturan atau mekanisme yang berlaku dalam pola kemitraan *contract farming*. Dimana sebahagian besar keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan usaha didominasi oleh perusahaan mitra. Misalnya dalam hal penentuan harga produk, kualitas komoditi yang dihasil, pengolahan lahan dan penentuan waktu panen semuanya itu kewenangannya berada pada perusahaan mitra.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut terlihat belum berfungsinya kelompok tani khususnya berkaitan dengan fungsi dari kelompok tani sebagai wahana kerjasama baik antara kelompok maupun dengan pihak lain seperti halnya kemitraan petani yang dilakukan dengan PT PAS dan PT VA. Dengan kata lain keberadaan dari suatu kelompok tani belum banyak pengaruhnya terhadap peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) petani terhadap jalannya kemitraan yang dilakukan selama ini dengan PT PAS dan PT VA. Dari 3 fungsi pokok suatu kelompok tani yaitu sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerjasama baru fungsi sebagai kelas belajar dan sebagai unit produksi yang dapat dijalankan, tetapi kelompok tani sebagai wahana kerjasama baik

dengan sesama anggota maupun kerjasama dengan pihak lain (kemitraan).

Kondisi eksternal kelompok tani

Dari sisi eksternal kurang berperannya kelompok tani terhadap kemitraan yang dijalankan tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani. Pembinaan terhadap kelompok tani ini pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kemampuan kelompok tani supaya kelompok tani dapat menjalankan fungsinya tidak saja sebagai kelas belajar, unit produksi tetapi juga sebagai wahana untuk melakukan kerjasama baik sesama anggota kelompok tani maupun kerjasama dengan pihak lain (kemitraan). Dengan meningkatnya kemampuan kelompok tani akan dapat mendorong kelompok tani menjadi kuat dan mandiri yang pada gilirannya akan memperkuat posisi tawarnya dalam melaksanakan kemitraan dengan pelaku agribisnis lainnya.

Berkaitan dengan pembinaan ini untuk kasus PT PAS dan PT VA dinas pertanian kabupaten Karo dan kabupaten Simalungun telah memberikan beberapa jenis pelatihan terhadap kelompok tani dalam jumlah yang terbatas misalnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Disamping itu yang sering mengikuti pelatihan tersebut adalah para pengurus kelompok tani, sementara untuk anggota kelompok tani boleh dikatakan tidak ada. Hal ini mengakibatkan berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada kelompok tani tidak banyak pengaruhnya terhadap peningkatan sumberdaya petani baik secara kelompok maupun secara individu. Disamping pembinaan yang masih terbatas, bantuan

dalam bentuk dana yang diberikan kepada kelompok tani juga masih terbatas. Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek pemberdayaan petani dalam pola kemitraan *contract farming* dapat kita simpulkan pada tabel berikut ini.

Dari berbagai uraian di atas memperlihatkan adanya pembinaan terhadap petani terutama oleh perusahaan mitra. Hal ini sesuai dengan kewajiban dari perusahaan mitra dalam *contract farming* untuk memberikan bantuan teknis kepada pihak petani. Namun demikian dari aspek pemberdayaan bantuan teknis yang diberikan tidak banyak membantu terhadap peningkatan sumberdaya petani dan kemandirian petani. Bahkan banyak pendapat dengan *contract farming* telah banyak menimbulkan ketergantungan (*dependency*) dari petani terhadap perusahaan mitra yang bersumber dari bantuan berupa dana, bibit dan bantuan lainnya yang diberikan oleh pihak perusahaan mitra. Demikian juga halnya dengan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Berbagai hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi internal atau peranan dari pada kelompok tani terutama dalam kaitannya dengan kemitraan yang mereka jalankan.

Pemberdayaan Petani Dengan Kemitraan Dagang Umum

Pemberdayaan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan terhadap petani dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia petani mitra dan penguatan posisi tawar petani, peningkatan partisipasi petani dan adanya kemandirian petani dikaitkan dengan

Tabel 1. Aspek pemberdayaan pada PT PAS dan PT VA dalam pola kemitraan *contract farming*

No	Jenis Kegiatan	Uraian
1.	Pembinaan perusahaan	Ada secara berkala melalui petugas lapangan sesuai dengan yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama (SPK)
2.	Pembinaan pemerintah	Relatif sedikit melalui kelompok tani, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang dijalankan
3.	Kondisi internal kelompok tani	Belum berfungsi secara optimal
4.	Kondisi eksternal kelompok tani	Belum optimal, mengingat terbatasnya bantuan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada

Sumber: Data Primer

jalannya kemitraan. Hal ini dapat kita dari beberapa hal antara lain: pembinaan yang diberikan oleh perusahaan mitra, pembinaan dari pemerintah, kondisi internal dari kelompok tani dan kondisi eksternal kelompok tani. Berikut dikemukakan detail hasil penelitian berkaitan dengan aspek pemberdayaan dalam kemitraan antara petani dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya dengan pola kemitraan dagang umum.

Pembinaan perusahaan

Hasil wawancara dengan petani, perusahaan mitra dan informan kunci dilihat dari sisi pembinaan yang diberikan oleh pihak perusahaan mitra pada dasarnya tidak ada sama sekali. Hal ini tentu sesuai dengan konsep dan mekanisme yang berlaku dalam pola kemitraan dagang umum yang tidak mewajibkan bagi perusahaan mitra untuk memberikan bantuan teknis kepada petani mitranya. Namun demikian secara informal pihak perusahaan mitra sering juga memberikan berbagai masukan kepada petani yang menjadi langganannya berkaitan dengan teknik budidaya sesuai dengan komoditi yang menjadi spesialisasi dari masing-masing perusahaan misalnya CV Mburaq dengan spesialisasi untuk komoditi kentang sementara untuk PT Victor Jaya untuk komoditi kentang dan tomat. Selain itu pembinaan secara informal dari perusahaan mitra ini dapat juga kita lihat dari adanya bantuan bibit yang lebih berkualitas yang diberikan kepada petani, dengan pemberian bibit berkualitas yang diberikan pihak perusahaan berharap kualitas komoditi yang dihasilkan juga lebih baik. Jadi perusahaan mitra biasanya memiliki stok bibit terutama kentang yang akan diberikan kepada petani yang menjadi mitranya. Bagi petani sendiri adanya bantuan bibit ini juga merupakan suatu hal yang bermanfaat mengingat cukup sulitnya bagi petani mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik terutama untuk kentang.

Pembinaan pemerintah

Dari sisi pembinaan pemerintah, walaupun tidak berkaitan langsung dengan kemitraan usaha yang mereka lakukan, pemerintah melalui tenaga penyuluh atau PPL yang

dimiliki juga memberikan pembinaan kepada petani melalui kelompok tani yang bermitra dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 273 tahun 2007 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, maka pembinaan terhadap kelompok tani diarahkan kepada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuh kembangkan kerjasama antara petani dan pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan usaha taninya. Selain itu pembinaan terhadap kelompok tani diharapkan dapat membantu manggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya.

Adanya pembinaan terhadap kelompok tani ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Namun demikian menurut informan kunci, pembinaan yang diberikan kepada selama ini lebih banyak diarahkan kepada aspek-aspek agronomis atau budidaya pertanian sehingga pembinaan yang diberikan tidak banyak membantu dalam memperkuat posisi tawar petani dalam menjalankan kemitraan khususnya bagi petani yang bermitra dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Seperti kita ketahui secara umum suatu kelompok tani akan berfungsi sebagai media belajar bagi petani, sebagai unit produksi dan sebagai unit ekonomi. Dengan demikian fungsi kelompok tani selama ini termasuk pada lokasi kasus penelitian lebih banyak mengarah kepada fungsi media belajar dan sebagai unit produksi. Sehingga dapat dikatakan relatif kurang berfungsi sebagai unit ekonomi bagi yang berakibat kurang berperannya kelompok tani ini dalam memperkuat posisi tawar petani ketika berhadapan dengan perusahaan mitra. Selain itu ada beberapa petani yang merasa kurang yakin dengan apa yang disampaikan oleh petugas PPL sehingga penyuluhan yang diberikan dirasakan kurang bermanfaat.

Kondisi internal kelompok tani

Dari sisi kondisi internal kelompok tani, pada dasarnya kelompok tani tidak berperan atau tidak dilibatkan dalam kemitraan usaha yang dijalankan. Jadi kemitraan yang dilakukan oleh petani bukan atas nama kelompok tetapi adalah atas nama individu masing-masing petani walaupun petani mitra tersebut pada dasarnya merupakan anggota dari suatu kelompok tani yang berada di lokasi penelitian. Sehingga dengan demikian keberadaan dari pada kelompok tani juga tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya kemitraan usaha yang dilakukan oleh petani dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Dengan demikian bantuan teknis yang diberikan kepada para petani mitra yang ada pada kedua perusahaan tersebut adalah bersifat tidak langsung dan sangat terbatas.

Dari berbagai penjelasan tersebut terlihat belum berfungsinya kelembagaan ditingkat petani khususnya kelompok tani khususnya berkaitan dengan fungsi dari kelompok tani sebagai wahana kerjasama baik antara kelompok maupun dengan pihak lain seperti halnya kemitraan petani yang dilakukan dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Jadi dari 3 fungsi pokok dari suatu kelembagaan petani yaitu sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerjasama hanya baru fungsi sebagai kelas belajar dan sebagai unit produksi baru yang dapat dijalankan.

Kondisi eksternal kelompok tani

Dari sisi kondisi eksternal terlihat masih terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada khususnya yang bermitra dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Keadaan ini jelas akan berpengaruh terhadap kinerja dari pada kelompok tani yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap peranan yang dapat dimainkan oleh kelompok tani khususnya berkaitan dengan kemitraan usaha yang dijalankan. Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek pemberdayaan petani dalam pola kemitraan dagang umum antara petani dengan CV Mburaq dan PT Victor Jaya dapat kita simpulkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Aspek pemberdayaan pada CV. Mburaq dan PT. Victor Jaya dalam pola kemitraan dagang umum

No	Jenis Kegiatan	Uraian
1.	Pembinaan perusahaan	Tidak ada, karena memang tidak ada aturan untuk itu
2.	Pembinaan pemerintah	Relatif sedikit dan melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung
3.	Kondisi internal kelompok tani	Relatif belum berfungsi secara optimal
4.	Kondisi eksternal kelompok tani	Belum optimal mengingat masih terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani yang ada

Sumber: Data Primer

Dari berbagai uraian di atas memperlihatkan pada dasarnya tidak adanya pembinaan terhadap petani terutama oleh perusahaan mitra. Hal ini sesuai dengan kewajiban dari perusahaan mitra dalam kemitraan pola dagang umum yang menyatakan bahwa tidak adanya bantuan teknis terhadap petani. Namun demikian ada pembinaan yang diberikan oleh perusahaan mitra walaupun tidak bersifat formal.

Pemberdayaan Petani Dengan Kemitraan Tradisional

Pemberdayaan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan terhadap petani dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia petani mitra, penguatan posisi tawar petani, peningkatan partisipasi petani dan kemandirian petani dikaitkan dengan jalannya kemitraan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yang meliputi: pembinaan yang diberikan oleh perusahaan mitra, pembinaan dari pemerintah, kondisi internal dan eksternal kelompok tani. Berikut dikemukakan hasil penelitian berkaitan dengan aspek pemberdayaan petani dalam kemitraan antara petani dengan pedagang pengumpul dengan pola kemitraan tradisional.

Pembinaan perusahaan

Hasil wawancara dengan petani, pedagang pengumpul dan informan kunci menunjukkan bahwa dari sisi pembinaan yang diberikan oleh pihak pedagang pengumpul terlihat tidak ada. Hal ini tentu sesuai dengan aturan atau sistem dan mekanisme yang ada dalam kemitraan pola tradisional yang tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan pihak pedagang pengumpul sebagai mitra untuk memberikan pembinaan kepada petani dalam bentuk bantuan teknis seperti halnya yang terjadi dalam *contract farming*. Namun demikian seperti halnya yang terjadi dalam pola dagang umum, pedagang pengumpul sering juga memberikan bibit untuk berbagai jenis sayuran kepada petani langganannya selain untuk pengikat hal seperti itu juga secara informal merupakan bentuk pembinaan yang diberikan oleh pedagang kepada petani mitranya. Bila kita amati lebih lanjut sebenarnya bantuan teknis terutama berkaitan berbagai hal yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan pasca panen sangat diperlukan oleh petani terutama dalam rangka peningkatan kualitas produksinya. Namun hal ini tidak diberikan oleh pihak pedagang pengumpul sebagai mitra petani karena memang tidak adanya aturan untuk itu. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan pola kemitraan yang efektif.

Pembinaan pemerintah

Dari sisi pembinaan yang diberikan pemerintah maka seperti halnya yang terjadi pada pola kemitraan lainnya maka dalam kemitraan tradisional walaupun tidak ada bantuan teknis dari pedagang pengumpul maka pemerintah melalui tenaga penyuluh atau PPL yang dimiliki memberikan pembinaan kepada petani melalui kelompok tani walaupun pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan kemitraan yang dilakukan oleh petani. Seperti halnya pada pola kemitraan lainnya pembinaan terhadap kelompok tani diarahkan kepada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuh kembangkan kerjasama antara petani dan pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan usaha

taninya. Disamping itu melalui pembinaan terhadap kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya. Dengan adanya pembinaan terhadap kelompok tani ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Namun demikian seperti yang terjadi dalam pola kemitraan *contract farming* dan pola kemitraan dagang umum maka permasalahannya adalah pembinaan yang dilakukan selama ini oleh pihak PPL biasanya melalui kegiatan penyuluhan lebih banyak diarahkan kepada aspek-aspek agronomis sehingga pembinaan yang diberikan tidak banyak membantu dalam memperkuat posisi tawar petani dalam menjalankan kemitraan dengan pedagang pengumpul diberbagai lokasi penelitian. Selain itu ada juga beberapa petani yang merasa kurang yakin dengan apa yang disampaikan oleh petugas PPL sehingga penyuluhan yang diberikan dirasakan kurang bermanfaat.

Kondisi internal kelompok tani

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan suatu kemitraan tidak terlepas dukungan dari kelompok tani. Karena dengan kelompok tani akan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi pihak lain dalam menjalankan kemitraan jika dibandingkan petani bergerak sendiri-sendiri. Dalam kemitraan yang dilakukan antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya keberadaan suatu kelompok tani sangat ditentukan oleh seberapa besar kelompok tani yang ada dapat berperan berkaitan dengan berbagai keputusan dalam pelaksanaan kemitraan. Dengan kata lain peranan dari kelompok tani tercermin dari seberapa besar keterlibatan dari kelompok tani dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan kemitraan yang pada dasarnya mencerminkan kondisi internal dari suatu kelompok tani.

Dalam kaitannya dengan program kemitraan yang dijalankan pada kasus petani bermitra dengan pedagang pengumpul yang ada pada berbagai lokasi penelitian dengan pola kemitraan tradisional seperti halnya yang terjadi pada pola kemitraan lainnya kelompok tani juga tidak banyak berperan atau tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan kemitraan yang dijalankan oleh para anggota kelompok tani. Sehingga keberadaan dari pada kelompok tani tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya kemitraan yang dilakukan oleh petani. Munculnya hal ini tidak terlepas dari mekanisme yang ada dalam kemitraan tradisional. Walaupun petani dalam kemitraan tradisional memiliki beberapa kewenangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan, tetapi petani dalam menjalin hubungan kemitraan dengan pedagang pengumpul tidak atas nama kelompok tani. Sehingga kelompok tani tidak banyak terlibat dalam jalannya kemitraan yang dilakukan. Dengan demikian keberadaan dari suatu kelompok tani belum banyak pengaruhnya terhadap peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) petani terhadap jalannya kemitraan yang mereka lakukan selama ini dengan pedagang pengumpul yang ada pada berbagai lokasi penelitian.

Dari berbagai penjelasan di atas khususnya yang berkaitan dengan kondisi internal kelompok tani secara umum dari setiap pola kemitraan yang ada memperlihatkan relatif kecilnya peranan dari kelompok tani terhadap pengambilan keputusan berbagai hal yang berkaitan dengan jalannya suatu kemitraan. Hal ini disebabkan mekanisme yang ada pada setiap pola kemitraan yang ada sehingga menjadikan kelompok tani tidak banyak dapat berperan dalam kemitraan yang dijalankan.

Selain itu tidak berperannya kelompok tani ini juga tidak terlepas dari kondisi internal dari kelompok tani itu sendiri yang secara umum masih terbatas. Baik dilihat dari kelengkapan pengurus dan sumberdaya pengurus baik secara kuantitas dan kualitas misalnya dari tingkat pendidikannya yang relatif rendah dan kelengkapan struktur organisasi dari kelompok tani yang pada

umumnya hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Selain itu pada umumnya kelompok tani yang ada di lokasi penelitian belum memiliki pembahagian tugas yang jelas dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi dari kelompok tani yang ada. Berbagai hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuan dari kelompok tani untuk dapat mengakses berbagai hal misalnya keterbatasan terhadap informasi pasar dan permodalan. Dari kondisi fisik kelompok tani, setiap kelompok tani pada umumnya tidak memiliki sekretariat yang permanen, yang menjadi sekretariat dari kelompok tani adalah rumah dari ketua kelompok.

Berkaitan dengan kondisi dari kelompok tani ini, hasil penelitian Saptana *et al* (2004) juga menemui kondisi yang sama dari kelompok tani yang ada di beberapa daerah sentra produksi sayuran di Sumatera yang meliputi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menyimpulkan bahwa lemahnya struktur, fungsi, dinamika konsolidasi dari kelompok tani yang mengakibatkan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam berhadapan dengan pedagang, eksportir dan perusahaan pertanian termasuk dalam kemitraan. Pada umumnya kelompok tani masih sebatas pada pertemuan rutin kelompok berupa kegiatan arisan baik uang maupun tenaga kerja. Demikian juga halnya dengan penelitian Anwar (2007) yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya peranan dari kelompok tani yang ada di kabupaten Agam dan Solok dalam pemasaran sayuran, hal ini disebabkan keterbatasan petani dalam sumberdaya manusia dan akses terhadap informasi pasar yang terbatas terutama pasar global. Kemudian dari pengamatan peneliti di lapangan keberadaan kelompok tani yang ada di berbagai lokasi penelitian secara umum belum banyak membantu petani dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi petani termasuk dalam menjalankan kemitraan. Keberadaan kelompok tani selama ini lebih banyak ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai program dan bantuan yang merupakan proyek pemerintah, sehingga kalau program dan bantuan dari pemerintah habis maka

kelompok taninya juga tidak aktif lagi. Misalnya saja untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maka petani diharuskan menjadi anggota dari kelompok tani terlebih dahulu, demikian juga terhadap berbagai program dan bantuan lainnya.

Kondisi eksternal kelompok tani

Kurang berperannya kelompok tani dalam jalannya kemitraan termasuk dalam pola kemitraan tradisional tidak terlepas dari kondisi eksternal dari kelompok tani itu sendiri khususnya berkaitan dengan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok tani. Pembinaan terhadap kelompok tani ini pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kemampuan kelompok tani supaya kelompok tani dapat menjalankan fungsinya tidak saja sebagai kelas belajar, unit produksi tetapi juga sebagai wahana untuk melakukan kerjasama baik sesama anggota kelompok tani maupun kerjasama dengan pihak lain (kemitraan). Dengan meningkatnya kemampuan kelompok tani akan dapat mendorong kelompok tani menjadi kuat dan mandiri yang pada gilirannya akan memperkuat posisi tawarnya dalam melaksanakan kemitraan dengan pelaku agribisnis lainnya.

Berkaitan dengan pembinaan ini untuk kasus kemitraan tradisional dinas pertanian kabupaten Agam, Tanah Datar dan Solok telah memberikan beberapa jenis pelatihan terhadap kelompok tani yang ada pada berbagai lokasi penelitian. Namun demikian sebagai mana masalahnya ditempat lain pelatihan yang diberikan juga masih terbatas. Disamping itu juga yang sering mengikuti pelatihan tersebut adalah para pengurus kelompok tani, sementara untuk anggota kelompok tani boleh dikatakan tidak ada. Hal ini mengakibatkan berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada kelompok tani tidak banyak pengaruhnya terhadap peningkatan sumberdaya petani baik secara kelompok maupun secara individu. Begitu juga bantuan dalam bentuk dana yang diberikan kepada kelompok tani juga masih terbatas. Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek

pemberdayaan petani dalam pola kemitraan tradisional dapat kita simpulkan pada table 3.

Tabel 3. Aspek Pemberdayaan dalam Pola Kemitraan Tradisional

No	Jenis Kegiatan	Uraian
1.	Pembinaan perusahaan	Tidak ada, karena memang tidak ada aturan untuk itu
2.	Pembinaan pemerintah	Relatif sedikit dan melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung
3.	Kondisi internal kelompok tani	Relatif belum berperan secara optimal
4.	Kondisi eksternal kelompok tani	Belum optimal, mengingat masih terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah

Sumber: Pengolahan Data Primer

Dari berbagai uraian di atas memperlihatkan tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pedagang pengumpul kepada para petani mitranya. Keadaan ini sesuai dengan aturan yang ada dalam kemitraan tradisional yang tidak mewajibkan pedagang pengumpul untuk memberikan bantuan teknis kepada petani seperti halnya dalam *contract farming*. Demikian juga halnya dengan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah melalui PPL juga masih terbatas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peranan dari kelompok tani khususnya dalam pelaksanaan kemitraan. Namun demikian dari aspek pemberdayaan walaupun dalam kemitraan tradisional memperlihatkan relatif kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul tetapi dengan kemitraan tradisional secara umum petani beranggapan lebih mandiri dan merdeka karena petani dapat memutuskan berbagai hal dengan leluasa berkaitan dengan usaha tani yang dilakukannya. Informasi lengkap berkaitan dengan aspek pemberdayaan ini dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perbandingan aspek pemberdayaan dalam pola kemitraan *contract farming*, pola kemitraan dagang umum dan pola kemitraan tradisional

No	Jenis Kegiatan	Pola Kemitraan		
		<i>Contract Farming</i>	Dagang Umum	Tradisional
1	Pembinaan Perusahaan Mitra	Ada, secara berkala melalui petugas lapangan sesuai dengan SPK	Tidak ada, karena memang tidak ada aturan untuk itu	Tidak ada, karena memang tidak ada aturan untuk itu
2	Pembinaan oleh Pemerintah	Relatif sedikit melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung	Relatif sedikit dan melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung	Relatif sedikit dan melalui kelompok tani dan bersifat tidak langsung
3	Kondisi Internal Kelompok tani	Relatif belum berperan secara optimal	Relatif belum berperan secara optimal	Relatif belum berperan secara optimal
4	Kondisi Eksternal Kelompok tani	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok tani yang ada	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kel. tani	Belum optimal mengingat terbatasnya pembinaan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kel. tani

Sumber: Data Primer

KESIMPULAN

Dari berbagai analisis di atas dari aspek pemberdayaan petani walaupun ada pembinaan yang diberikan perusahaan mitra dalam bentuk bantuan teknis kepada petani, secara umum *contract farming* sebenarnya tidak banyak mendorong ke arah kemandirian petani. Dengan kata lain *contract farming* sebenarnya tidak banyak membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani. Selain itu dengan *contract farming* sebenarnya telah banyak menciptakan tingginya tingkat ketergantungan petani kepada pihak perusahaan mitra (*dependency*) bukan saling ketergantungan (*interdependency*). Dengan adanya bantuan berbagai sarana produksi pertanian yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada petani dalam bentuk pinjaman atau hutang telah menimbulkan ketergantungan petani kepada perusahaan mitra. Sementara itu dengan kemitraan tradisional petani dianggap lebih dapat mandiri. Walaupun dalam kemitraan tradisional memperlihatkan relatif kurangnya upaya-upaya terutama oleh pedagang pengumpul yang mengarah kepada

pemberdayaan petani, namun demikian dengan kemitraan tradisional secara umum lebih dapat menjadikan petani mandiri karena petani dapat memutuskan berbagai hal dengan leluasa berkaitan dengan usaha tani yang dilakukannya. Selain itu dengan kemitraan yang mereka jalankan dengan pedagang pengumpul petani merasa lebih bebas dalam menentukan berbagai hal berkaitan dengan usaha tani yang mereka jalankan, misalnya saja dalam hal jenis tanaman yang ditanam, kualitas dan pengolahan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, E. 2007. Pengaruh kebijakan pemerintah dalam ekspor komoditi hortikultura terhadap pendapatan petani Sumatera Barat. Tesis Pascasarjana Unand. Padang.
- Basdabella, S. 2001. Pengembangan sistem agroindustri kelapa sawit dengan pola perusahaan agroindustri rakyat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 271 hal.
- Departemen Pertanian. 2004. Kinerja pembangunan sistem dan usaha agribisnis hortikultura. Jakarta.

- Departemen Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani. Jakarta.
- Eaton, C and Andrew W, S. 2001. Contract farming partnerships for growth. FAO Agricultural services bulletin 145. Roma.
- Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 162 hal.
- Hastuti, E, L dan Bambang, I. 2004. Peranan kelembagaan lokal pada kegiatan agribisnis di pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 1997. Ke arah pengembangan agribisnis di pedesaan menghadapi globalisasi abad 21. Simposium Nasional Agribisnis. Jakarta. Hal. 1-18.
- Saptana et al. 2004. Pemantapan model pengembangan kawasan agribisnis sayuran Sumatera (KASS). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sihaloho, H. 2004. pemberdayaan pengusaha kecil melalui bantuan kredit dan pendampingan. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. 268 hal.
- Soewardi, H. 1997. Strategi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui agribisnis. Simposium Nasional Agribisnis. Jakarta. Hal. 1-21.
- Sumardjo, J. Sulaksana, dan W. A. Darmono. 2004. Kemitraan Agribisnis. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal 88.